

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DIY Berdasarkan Pendekatan *Value for Money* Tahun 2019-2023

¹Ninda Putri Zulekha Sapta Agusti, ²Mudasetia Hamid

^{1,2}Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Kota Yogyakarta

E-mail: ¹nindaputri386@gmail.com, ²mudasetia@stieww.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan pendekatan *value for money* periode 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan menggunakan data sekunder. Teknik analisis data dilakukan dengan menghitung rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas untuk menilai kinerja keuangan daerah selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DIY tahun 2019-2023 berada pada kategori ekonomis dan efektif, namun masih terdapat beberapa tahun anggaran yang menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun realisasi pendapatan mampu mencapai target yang ditetapkan, pengelolaan belanja daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih efisien. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DIY diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan prinsip *value for money* untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Kata kunci : *kinerja keuangan daerah, value for money, rasio ekonomis, rasio efisiensi, rasio efektivitas*

ABSTRACT

Effective management of regional finances is a key indicator of the success of local governments in establishing accountable and transparent governance. This study aims to analyze the financial performance of the Special Region of Yogyakarta (DIY) based on a value for money approach for the period 2019-2023. This research employs a descriptive quantitative methodology and utilizes secondary data. The data analysis technique involves calculating economic ratios, efficiency, and effectiveness to evaluate the financial performance of the region during the study period. The findings indicate that, overall, the financial performance of the DIY Provincial Government from 2019 to 2023 falls within the categories of economic and effective; however, there are still several budget years that exhibit suboptimal efficiency levels. This condition suggests that although revenue realization has met the established targets, the management of regional expenditures requires enhancement to achieve greater efficiency. Therefore, it is anticipated that the DIY Provincial Government will continue to improve the application of value for money principles to promote more efficient, effective, and results-oriented regional financial management.

Keyword : *kinerja keuangan daerah, value for money, rasio ekonomis, rasio efisiensi, rasio efektivitas*

1. PENDAHULUAN

Good Governance merupakan suatu pilar utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan prinsip tersebut menjadi semakin penting seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator yang penting dalam keberhasilan otonomi daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan anggaran, tetapi juga sejauh mana pengelolaan anggaran dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Secara historis, evaluasi kinerja daerah sering bergantung pada analisis rasio keuangan konvensional, yang menekankan aspek kuantitatif. Pendekatan ini dianggap kurang memadai untuk sepenuhnya menggambarkan kualitas keuangan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara komprehensif.

Konsep *value for money* merupakan salah satu metode pendekatan yang banyak digunakan dalam penilaian kinerja keuangan sektor publik dengan mengukur rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip ekonomi berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk memperoleh input dan biaya terendah tanpa mengorbankan kualitas, prinsip efisiensi berfokus pada pengoptimalan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output, sementara prinsip efektivitas menilai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Pendekatan ini berkembang dari praktek akuntansi publik internasional dan direkomendasikan oleh lembaga seperti

internasional federation of accountant (IFAC). Di tingkat global penerapan VfM telah terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas publik seperti Inggris dan Australia.

Dalam konteks ini, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti karena daerah ini memiliki status keistimewaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang memberikan kewenangan khusus dalam pengelolaan pemerintahan. Provinsi DIY juga dikenal sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan budaya, sehingga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama di Pulau Jawa. Selain itu, periode tahun anggaran 2019-2023 mencakup kondisi sebelum pandemi Covid-19, masa pandemi, hingga fase pemulihan, yang berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019-2023 dengan menggunakan pendekatan *value for money*.

2. LANDASAN TEORI

a. Kinerja Keuangan

Menurut Mokodompit (dalam Tomi Hardiansyah, 2024), kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja merupakan sebuah hasil pencapaian atas segala sesuatu yang telah direncanakan dalam suatu periode tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Mahsun (2016) kinerja keuangan adalah tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan yang baik

mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo, (2018) sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

c. Pengukuran Value for Money

Menurut Deasy (2023) *Value For Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana metode pendekatan ini diartikan penghargaan terhdap nilai uang. *Value for Money* merupakan suatu konsep penilaian kinerja organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (M. Iqbal Ashari, 2020). Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya publik secara hemat, optimal, dan berorientasi pada pencapaian hasil. *Value for money* mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah dibandingkan dengan pendekatan keuangan konvensional.

Rasio ekonomis digunakan untuk mengukur tingkat kehematan pemerintah dalam merealisasikan belanja

dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dapat dihitung menggunakan rumus berikut: $(\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$

Gambar 1.1 Kriteria Ekonomis

Rasio Ekonomis	Kategori
>100%	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
<60%	Tidak Ekonomis

Rasio efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola belanja untuk menghasilkan pendapatan atau output tertentu.

Rumus : $(\text{Realisasi Belanja} / \text{Realisasi Pendapatan}) \times 100\%$

Gambar 1.2 Kriteria Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kategori
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Kurang Efisien
<60%	Sangat Efisien

Rasio efektivitas mengukur kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Rumus: $(\text{Realisasi Pendapatan} / \text{Anggaran Pendapatan}) \times 100\%$

Gambar 1.3 Kriteria Efektifitas

Rasio Efektifitas	Kategori
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

2.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang dapat memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan (Samukri, 2020) Menurut Asep Risman dan Mustaffa (2023) laporan keuangan secara umum terdiri dari:

- a. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)
- b. Laporan Neraca (*balance sheet*)
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (*laba ditahan*)
- d. Laporan arus kas (*statement of Cash Flow*)

Sedangkan unsur laporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada PSAP Nomor 1, komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan pemerintah terdiri dari 2 hal, yaitu laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen laporan keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi DIY berdasarkan konsep *value for money*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DIY tahun anggaran

2019-2023. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang melibatkan laporan keuangan yang diperoleh dari sumber resmi pemerintah daerah.

Objek penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DIY, dengan fokus pada analisis pengukuran rasio *value for money* yang mencakup rasio ekonomi efisiensi dan efektivitas. Rasio ekonomi digunakan untuk menilai tingkat penghematan dalam realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan belanja dalam menghasilkan pendapatan atau keluaran tertentu. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Teknik analisis data melibatkan perhitungan setiap indikator rasio *value for money*, yang meliputi rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Hasil perhitungan rasio tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian untuk menentukan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif guna memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan pemerintah Provinsi DIY selama periode penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DIY tahun 2019-2023 berdasarkan pendekatan *value for money* menunjukkan variasi kinerja pada aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

1. Rasio Ekonomis

a. Tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat 4 kabupaten dan 1 kota dengan nilai

perhitungan ekonomis di bawah 100%, berdasarkan kriteria ekonomis maka dapat dikatakan bahwa kabupaten dan kota di DIY termasuk kategori ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dengan tingkat pengeluaran yang relative sedikit serta tidak melebihi batas anggaran yang direncanakan.

b. Tahun 2020

Rasio ekonomis pada tahun 2020 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi DIY mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Nilai presentase rasio ekonomis berada pada kisaran 76 persen hingga 85 persen dengan kriteria kurang ekonomis hingga cukup ekonomis. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah jauh lebih rendah dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan. Tahun 2020 juga merupakan periode awal terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak program dan kegiatan pemerintah daerah mengalami penundaan dan relokasi belanja untuk penanganan pandemi.

c. Tahun 2021

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomis pada tahun 2021 kinerja keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY mengalami peningkatan persentase yang mulai stabil dan Kembali pada

kriteria ekonomis dengan rasio berkisar antara 93 persen hingga 97 persen. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa belanja daerah telah dilaksanakan dengan lebih optimal dan mendekati anggaran yang ditetapkan, tanpa melampaui batas yang direncanakan. Dengan demikian, tahun 2021 dapat diartikan sebagai fase pemulihan kinerja pengelolaan keuangan daerah setelah terjadinya gangguan fiskal pada tahun 2020.

d. Tahun 2022

Pada tahun 2022, hasil perhitungan rasio ekonomis menunjukkan variasi kinerja yang cukup mencolok antar daerah. Beberapa kabupaten dan Kota Yogyakarta memiliki nilai persentase diatas 100 persen sehingga berada pada kriteria sangat ekonomis, sedangkan Kabupaten Sleman berada tepat pada nilai 100 persen yang termasuk dalam kategori ekonomis dan Kabupaten Gunung Kidul yang berada pada nilai 99 persen.

e. Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomis tahun 2023, kinerja rasio pemerintah Kabupaten dan Kota Yogyakarta di DIY cenderung lebih stabil, sebagian besar daerah Kembali berada pada kategori ekonomis dengan rasio di bawah 100 persen. Kabupaten Bantul menjadi satu-satunya daerah dengan kriteria cukup ekonomis sebesar 89 persen, sedangkan daerah lainnya menunjukkan kinerja ekonomis yang relatif baik.

2. Rasio Efisiensi

a. Tahun 2019

Pada tahun 2019, Sebagian besar pemerintah kabupaten dan Kota Yogyakarta berada pada kriteria kurang efisien hingga tidak efisien. Rasio efisien yang mendekati atau melebihi 100% menunjukkan bahwa realisasi belanja hampir sama atau bahkan lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Kondisi ini mengindikasikan ketrgantungan daerah terhadap sumber pendanaan lain, seperti transfer dari pemerintah pusat, serta menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum sepenuhnya mampu mendukung kebutuhan belanja.

b. Tahun 2020

Kinerja efisiensi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY pada tahun 2020 menunjukkan kondisi yang relatif bervariasi. Kota Yogyakarta memiliki nilai rasio sebesar 89% dan dikategorikan cukup efisien, kondisi ini mencerminkan adanya kemampuan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengendalikan belanja dan menjaga keseimbangan fiskal di tengah keterbatasan anggaran. Sementara itu, kabupaten lainnya memiliki nilai rasio dibawah dan mendekati 100%, sehingga dapat dikategorikan kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan digunakan untuk membiayai belanja, sehingga ruang penghematan belanja relatif kecil.

c. Tahun 2021

Pada tahun 2021, analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa semua pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi DIY termasuk dalam kategori kurang efisien. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, meskipun mencatat rasio di bawah 100%, tetap menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah karena proporsi belanja terhadap pendapatan masih sangat besar. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul dengan rasio efisiensi sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan fleksibilitas fiskal daerah serta rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penghematan anggaran. Secara umum, pada tahun 2021 belum terlihat adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan efisiensi belanja daerah di Provinsi DIY.

d. Tahun 2022

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada tahun 2022, kinerja efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi DIY menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Empat kabupaten mencatat rasio efisiensi di atas 100% dan dikategorikan sebagai tidak efisien. Sementara itu, Kota Yogyakarta memiliki rasio efisiensi sebesar 97% dan dikategorikan sebagai kurang efisien sehingga secara keseluruhan, tahun 2022 mencerminkan lemahnya pengendalian pengeluaran daerah dan meningkatnya tekanan fiskal, yang berpotensi

mengganggu keberlanjutan keuangan daerah di masa depan.

e. Tahun 2023

Pada tahun 2023, kinerja efisiensi belanja pemerintah daerah di Provinsi DIY menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar kabupaten dan Kota Yogyakarta mencatat rasio efisiensi di bawah 100% dan dikategorikan kurang efisien. Namun demikian, Kabupaten Sleman masih menunjukkan rasio efisiensi sebesar 101% dan dikategorikan tidak efisien, yang berarti realisasi belanja daerah masih lebih besar dibandingkan pendapatan. Dengan demikian, peningkatan efisiensi belanja daerah belum merata di seluruh wilayah Provinsi DIY.

3. Rasio Efektifitas

a. Tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat 4 kabupaten dan 1 kota dengan angka presentase di atas 100%, sesuai dengan kriteria maka kinerja keuangannya termasuk kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan perencanaan anggaran yang realistis serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun dengan tingkat efektivitas yang sangat baik sebelum terjadinya gangguan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

b. Tahun 2020

Pada tahun 2020, rasio efektivitas seluruh kabupaten dan kota di Provinsi DIY mengalami penurunan. Kota Yogyakarta memiliki angka rasio 90% dan Kabupaten Bantul 91% masih tergolong efektif, sedangkan Kabupaten Sleman, Gunungkidul dan Kulon Progo termasuk kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan belum mencapai target, penurunan ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang melemahkan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa sebagai penopang utama perekonomian DIY.

c. Tahun 2021

Pada tahun 2021, pemulihan kinerja efektivitas mulai terlihat. Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman masing-masing mencatat rasio 102%, sedangkan Kabupaten Kulon Progo mencapai 104%. Keempat daerah ini termasuk dalam kategori sangat efektif. Di sisi lain, Kabupaten Gunungkidul mencatat rasio 98 persen dan tergolong dalam kategori efektif. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2022, kinerja efektivitas menunjukkan hasil yang sangat baik dan merupakan capaian tertinggi selama periode penelitian. Seluruh kabupaten dan kota di DIY memiliki rasio di atas 100%. Kota Yogyakarta mencapai 111 persen, Kabupaten Bantul 105%, Kabupaten Sleman

104%, Kabupaten Kulon Progo 127%, dan Kabupaten Gunungkidul 102%. Semua termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingginya rasio efektivitas pada tahun 2022 mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin kuat pasca pandemi.

e. Tahun 2023

Pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, namun secara keseluruhan masih menunjukkan kinerja yang baik. Kota Yogyakarta mencatat rasio 103 persen dan Kabupaten Kulon Progo 101 persen, yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Kabupaten Bantul mencapai 98 persen, Kabupaten Sleman 99 persen, dan Kabupaten Gunungkidul 97 persen, yang semuanya termasuk dalam kategori efektif. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan target pendapatan seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, sehingga pencapaiannya menjadi lebih menantang. Namun demikian, secara keseluruhan, kinerja efektivitas pada tahun 2023 masih tergolong baik dan stabil.

Sementara itu jika menggunakan data laporan reaktivasi anggaran secara keseluruhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Berdasarkan perhitungan rasio ekonomi yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2019-2023, tingkat ekonomi menunjukkan fluktuasi antara 84% dan 95%, yang menandakan bahwa pengeluaran aktual umumnya lebih rendah daripada anggaran yang

dialokasikan. Situasi ini menggambarkan strategi pengelolaan anggaran yang bijaksana dan teratur, bebas dari segala bentuk pemborosan.

Pada tahun 2019, rasio ekonomi tercatat sebesar 93% (ekonomi), yang kemudian turun menjadi 84% (cukup ekonomi) pada tahun 2020, menunjukkan pengeluaran yang lebih konservatif yang kemungkinan dipengaruhi oleh penyesuaian anggaran sebagai respons terhadap faktor eksternal. Setelah itu, rasio meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 91% dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 di angka 95%, keduanya diklasifikasikan sebagai ekonomi, sebelum mengalami penurunan lagi menjadi 89% (cukup ekonomi) pada tahun 2023. Mengingat bahwa pengeluaran operasional, terutama yang terkait dengan biaya pegawai, merupakan bagian terbesar dari anggaran daerah (APBD), temuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DIY secara konsisten mematuhi prinsip-prinsip ekonomi. Sebagai kesimpulan, evaluasi rasio ekonomi selama periode lima tahun ini menyoroti pengendalian anggaran yang efektif dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengurangi input pendanaan tanpa mengorbankan pencapaian tujuan program.

- b. Hasil perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Daerah Provinsi DIY tahun 2019-2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang rentang antara 79% - 103%, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target APBD. Pada tahun 2019, rasio efektivitas mencapai 101% yang termasuk dalam kategori sangat efektif, namun

mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 92% akibat pengaruh kondisi eksternal. Rasio efektivitas kembali stabil pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencatat kinerja terbaik dengan rasio efektivitas 103% yang menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan melampaui target secara signifikan. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 79% yang tergolong dalam kategori kurang efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan belum mencapai target. Secara keseluruhan, kinerja efektivitas pendapatan pemerintah Provinsi DIY selama tahun 2019-2022 tergolong baik, meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan pendapatan daerah di masa mendatang.

- c. Hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Provinsi DIY tahun 2019-2023 menunjukkan hasil yang fluktuatif, berkisar 87%-103%. Pada tahun 2019, 2020 rasio efisiensi tercatat sebesar 103% tergolong tidak efisien, yang berarti bahwa pengeluaran daerah melebihi pendapatan yang diterima. Tahun 2021 menunjukkan perbaikan dengan rasio yang menurun menjadi 91%, yang menunjukkan adanya pengendalian terhadap pengeluaran meskipun belum optimal. Pada tahun 2022 rasio efisiensi kembali meningkat, sedangkan tahun 2023 terlihat perbaikan yang signifikan dengan rasio sebesar 87% yang tergolong kategori cukup efisien. Secara keseluruhan kinerja efisiensi keuangan pemerintah Provinsi DIY tahun 2019-2023 tetap tidak stabil dan belum sepenuhnya efisien, masih perlu perbaikan dalam perencanaan anggaran agar lebih selaras dengan kemampuan pendapatan daerah di masa depan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi DIY tahun 2019-2023 dengan menggunakan pendekatan *value for money*, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah menunjukkan hasil yang cukup baik.

1. Dari segi ekonomis, sebagian besar kota/kabupaten di DIY telah memenuhi kriteria ekonomis, yang dibuktikan dengan nilai rasio ekonomi yang berada di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah tidak melebihi anggaran yang ditetapkan, sehingga pengelolaan belanja dapat dianggap hemat dan sesuai dengan prinsip pengendalian biaya.
2. Dari segi efisiensi, kinerja keuangan yang ditunjukkan setiap daerah menunjukkan hasil yang fluktuatif. Beberapa kota/kabupaten di kelompokkan cukup efisien, namun masih terdapat daerah yang tergolong kurang efisien. Hal ini disebabkan oleh perbandingan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja yang belum sepenuhnya optimal, sehingga rasio efisiensi berada di sekitar atau di atas 100%.
3. Dari segi efektivitas, sebagian besar kota/kabupaten di DIY berada pada kategori efektif. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi pendapatan daerah yang mampu memenuhi atau bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan.
4. Secara keseluruhan pengukuran kinerja keuangan dengan pendekatan *value for money* menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah

DIY periode 2019-2023 tergolong cukup baik, namun masih perlu upaya untuk peningkatan pada aspek efisiensi agar pengelolaan keuangan daerah dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan pengarahan, dan motivasi selama penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih kepada orang tua atas doa, dukungan moral, dan materiil yang senantiasa diberikan, selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Risman, & Matrodji Mustaffa. (2023). "LITERASI KEUANGAN BAGI UMKM: Laporan Keuangan Untuk Pengembangan Usaha UMKM. *Jurnal Abdimas Perbanas*.
- Deasy Erwina, & Siti Mu'alimah. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Kabupaten Tuban Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Finance and Accounting Studies*.
- Kekieta Gustie Berizky, & Rudi Kurniawan. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(1).
- M. Iqbal Ashari, & M. Elfan Kaukab. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money. *Urnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE.
- Prof. Dr Mardiasmo, MBA., Ak., C. (2018). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Samukri, & Rio Gusherinsyah. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*.
- Tomi Hardiansyah. (2024). *Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten Sleman Periode 2018-2021*.